

KERANGKA ACUAN – Konsultan Daerah

Nama Posisi	:	Pelaksana Lapangan/ Pelatih/ Field Officer
Lokasi Penempatan	:	Sintang, Ketapang, Landak, Manggarai Timur dan Manggarai Barat
Tipe Kontrak	:	Konsultan Individual
Durasi Penugasan Yang Diharapkan	:	Kontrak awal 6 bulan (Mei -Oktober 2019); dapat diperpanjang berdasarkan kinerja, ketersediaan anggaran dan kebutuhan organisasi.

Latar Belakang dan Konteks Organisasi

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan Presiden Indonesia menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah salah satu prioritas utama pembangunan dalam masa pemerintahannya. Komitmen tersebut tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN 2015-2019 yang menargetkan tingkat kemiskinan berkurang dari 11,25% di tahun 2014 menjadi 7-8% di tahun 2019.

Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam pengurangan kemiskinan karena sejak 1998 hingga saat ini tingkat kemiskinan selalu menurun. Namun demikian, 28,3 juta manusia Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, sementara 30% dari 12,5% penduduk yang berada dalam garis kemiskinan masih rentan untuk masuk kembali dalam kemiskinan.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia meningkatkan koordinasi dan pengawasan program-program perlindungan sosial dan kemiskinan di bawah kantor Wakil Presiden Republik Indonesia. Melalui Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2010 yang diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2015 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dibentuk dan diberi mandat untuk mengkoordinasi dan mengawasi program-program tersebut.

TNP2K berperan utama dalam mendefinisikan kebijakan-kebijakan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dengan cara:

- Meningkatkan program yang menggunakan metode umum dan daftar keluarga untuk semua program-program perlindungan sosial;
- Meningkatkan kinerja program-program penanggulangan kemiskinan melalui reformasi dalam desain program;
- Melaksanakan pengawasan dan evaluasi dampak terhadap program-program bantuan sosial; dan
- Membantu kementerian-kementerian dan lembaga negara terkait dalam menjaga kualitas program.

TNP2K - Kiat Guru Program

Untuk meningkatkan pelaksanaan layanan pendidikan di garis depan, mulai tahun 2014 TNP2K-Sekretariat Wakil Presiden RI telah melaksanakan pilot program untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas guru (KIAT Guru). Tujuan utama KIAT Guru adalah untuk memberdayakan masyarakat agar berkontribusi kepada peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar, yang diukur dari berkurangnya kemangkiran guru, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan hasil belajar murid. KIAT Guru direncanakan sebagai program multi-tahun, yang dimulai dari pra-pilot untuk mengujicoba mekanisme dan instrumen penelitian di tahun 2014-2016 dan diikuti oleh pilot di tahun 2016-2020.

KIAT Guru Fase 1 (KGP1) telah dilaksanakan untuk menguji dua mekanisme guna meningkatkan kehadiran dan kinerja guru serta hasil belajar murid. Mekanisme pemberdayaan masyarakat (MPM) memberi masyarakat peran yang sangat jelas untuk memantau dan mengevaluasi layanan guru dan untuk memastikan akuntabilitas guru. Ada juga mekanisme pembayaran berbasis kinerja (PBK), yang



mengaitkan Tunjangan Khusus Guru (TKG) dengan kehadiran atau kualitas layanan guru. Efektivitas kedua mekanisme tersebut telah diujicoba dengan mengombinasikan keduanya dalam tiga kelompok intervensi yaitu: (1) MPM, (2) MPM +PBK berbasis kehadiran guru, dan (3) MPM +PBK berbasis kualitas layanan guru.

Bank Dunia telah melakukan evaluasi dampak terhadap pelaksanaan KGP1 untuk mengidentifikasi kelompok intervensi mana yang paling efektif untuk meningkatkan hasil belajar murid. 270 SD diacak dan dibagi menjadi tiga kelompok intervensi dan satu kelompok kontrol. Analisis evaluasi dampak menemukan secara statistik dampak positif terhadap semua kelompok intervensi. Namun, kombinasi antara MPK + PBK berbasis kehadiran (kelompok 2) memiliki dampak paling kuat dalam meningkatkan kemampuan matematika dan bahasa Indonesia (pada deviasi standar 0,19 dan 0,17). Demikian pula, tampak adanya peningkatan kehadiran guru penerima TKG di kelas dan keterlibatan orang tua dalam bentuk pertemuan dengan guru dan bimbingan anak di rumah.

Berdasarkan hasil evaluasi dampak dan pembelajaran pelaksanaan KGP1, Pemerintah Indonesia berencana memperluas cakupan pelaksanaan dan memberlakukan intervensi yang serupa untuk membuat Tunjangan Profesi berbasis kinerja. 5 Kabupaten pelaksana KGP1 juga telah berkomitmen untuk mengalokasi anggaran mereka (sekitar 700,000 USD) untuk memantapkan intervensi kelompok 2 dan menjadikan kelompok 1 dan 3 menjadi kelompok 2 semua. Pada November 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta dukungan kepada Bank Dunia untuk rencana perluasan tersebut dan mengujicobakan mekanisme serupa di SMP menggunakan Tunjangan Profesi.

KIAT Guru Fase 2 (KPG2) akan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti penelitian kepada Kemdikbud, BAPPENAS, Kemenkeu tentang bagaimana pemerintah secara efektif dapat menerapkan secara nasional TKG dan TPG berbasis kinerja. Pemerintah Indonesia berencana membuat kebijakan TKG dan TPG berbasis kinerja secara nasional mulai tahun 2020 dan akan mempertimbangkan masukan dari pelaksanaan KGP2 sebagai masukan. Hasil dari KPG2 juga dapat memberikan masukan terhadap mekanisme desain untuk mengadaptasi UU ASN dalam sektor pendidikan dan penggunaan Dana Desa bagi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan layanan dasar pendidikan. KPG1 dan KPG2 dilaksanakan oleh Yayasan BaKTI, dengan arahan dari Tim Pengarah diketuai oleh Kemendikbud dan TNP2K-Sekretariat Wakil Presiden RI.

BaKTI Foundation

Program KIAT Guru didukung oleh Pemerintah Australia (DFAT) dan Amerika (USAID). Kedua institusi ini memberi dukungan dana untuk program melalui *Local Solutions to Poverty (LSP) Multi-Donor Trust Fund* dan *Local Service Delivery (LSD) Single Donor Trust Fund*, yang kedua dikelola oleh Bank Dunia. *Social Development Unit* – Bank Dunia bertanggungjawab atas tatakelola program dalam mendukung TNP2K, dan untuk itu telah menunjuk Yayasan BaKTI sebagai Penerima Hibah yang berperan dalam pengelolaan, operasional, dan pengawasan fidusia untuk dukungan teknis dan pelaksanaan kegiatan di tingkat nasional dan daerah. Posisi ini adalah bagian dari Kantor Program KIAT Guru di TNP2K, yang bertanggungjawab untuk mengelola implementasi kegiatan dan dukungan operasional program.

Ruang Lingkup

Tujuan Posisi

Posisi Pelaksana Lapangan dibutuhkan untuk melatih dan mendampingi pemangku kepentingan tingkat desa, sekolah, kecamatan dan kabupaten agar mampu melaksanakan Pemantapan dan Perluasan Program KIAT Guru secara berkualitas, sesuai dengan desain program KGP2, pedoman kegiatan tingkat desa/sekolah, kecamatan dan kabupaten serta pedoman pemantauan dan penelitian melalui keterlibatan aktif dan bermakna dari masyarakat serta kolaborasi pemerintah dan pemangku



kepentingan lainnya di tingkat kecamatan, desa-desa serta sekolah-sekolah tempat rintisan KIAT Guru dilaksanakan.

Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Pelaksana Lapangan akan bertanggung jawab untuk:

1. Melatih pemangku kepentingan di antaranya; Koordinator Pengawas, Pengawas, Kepala Sekolah, Kepala Desa, Kader Desa, Kelompok Pengguna Layanan, Komite Sekolah dan pemangku kepentingan lain yang relevan agar mampu melaksanakan Pemantapan dan Perluasan Program KIAT Guru secara berkualitas, sesuai dengan desain program KGP2, pedoman kegiatan tingkat desa/sekolah, kecamatan dan kabupaten serta pedoman pemantauan dan penelitian.
2. Memastikan pelaksanaan pelatihan pemangku kepentingan dilaksanakan dengan berkualitas melalui perencanaan materi pelatihan yang detail dan terstruktur, pelaksanaan pelatihan yang mengakomodasi pembelajaran orang dewasa dan pemantauan dan evaluasi paska pelatihan yang terus-menerus serta pelaporan pelaksanaan pelatihan.
3. Memastikan pemangku kepentingan untuk melaksanakan tindak-lanjut yang dihasilkan dari pelatihan dengan cara mendampingi fasilitator masyarakat lokal, koordinator pengawas, pengawas, dan pemangku kepentingan kecamatan yang relevan.
4. Memastikan keterlibatan aktif dan bermakna dari masyarakat serta kolaborasi jajaran pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kecamatan, dengan cara mengaktifkan forum-forum tingkat kecamatan sebagai wahana pembelajaran antar pemangku kepentingan desa/sekolah.
5. Membantu Koordinator Lapangan kabupaten untuk menguatkan tata-kelola pelaksanaan KGP2 oleh Pemerintah Daerah dengan pendampingan formal maupun informal terhadap anggota Tim Koordinasi Daerah agar transfer pengetahuan, sikap dan keahlian agar Pemerintah Daerah mampu melanjutkan program peningkatan kinerja dan akuntabilitas guru untuk meningkatkan hasil belajar murid.

Koordinasi

Penyelia posisi adalah Koordinator Advokasi Daerah dan sebagai Pelaksana Lapangan akan memberikan pendampingan (mentoring) kepada Fasilitator Masyarakat lokal dan anggota Tim Koordinasi Daerah yang bertugas menyupervisi pelaksanaan kegiatan KGP2 di tingkat desa/sekolah.

Keluaran (*Output*)

Konsultan harus mampu mencapai target keluaran sebagai berikut:

1. Dilatihnya pemangku kepentingan di antaranya; Koordinator Pengawas, Pengawas, Kepala Sekolah, Kepala Desa, Kader Desa, Kelompok Pengguna Layanan, Komite Sekolah dan pemangku kepentingan lain yang relevan agar mampu melaksanakan Pemantapan dan Perluasan Program KIAT Guru secara berkualitas, sesuai dengan desain program KGP2, pedoman kegiatan tingkat desa/sekolah, kecamatan dan kabupaten serta pedoman pemantauan dan penelitian.
2. Dilaksanakannya pelatihan pemangku kepentingan dilaksanakan dengan berkualitas melalui perencanaan materi pelatihan yang detail dan terstruktur, pelaksanaan pelatihan yang mengakomodasi pembelajaran orang dewasa dan pemantauan dan evaluasi paska pelatihan yang terus-menerus serta pelaporan pelaksanaan pelatihan.
3. Didampingi fasilitator masyarakat lokal dan anggota Tim Koordinasi Daerah yang bertugas menyupervisi pelaksanaan kegiatan KGP2 di tingkat desa/sekolah agar tindak-lanjut kegiatan tingkat desa/sekolah terlaksana secara berkualitas.
4. Diaktifkannya forum-forum tingkat kecamatan sebagai wahana pembelajaran antar pemangku kepentingan desa/sekolah agar terjadi keterlibatan aktif dan bermakna dari masyarakat serta kolaborasi jajaran pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kecamatan.
5. Dilatihkannya pedoman pelaksanaan kegiatan tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/sekolah, pedoman dan instrumen pemantauan & penelitian kepada Fasilitator Masyarakat Lokal dan pemangku kepentingan kabupaten yang menyupervisi kegiatan tingkat desa/sekolah.



6. Disusunnya perencanaan, jadwal, materi pelatihan dan pendampingan bagi Fasilitator Masyarakat dan anggota Tim Koordinasi Daerah.
7. Dituliskannya laporan-laporan pelaksanaan pelatihan.
8. Dikelolanya forum keterlibatan pemangku kepentingan tingkat kecamatan.
9. Meningkatnya alokasi sumber daya pemerintah kecamatan, untuk mendukung peningkatan kinerja dan akuntabilitas guru serta pelayanan dasar pendidikan.
10. Disepakatinya Kerangka Acuan keberlanjutan program peningkatan kinerja dan akuntabilitas guru oleh para pemangku kepentingan untuk dilaksanakan setelah KIAT Guru berakhir (*phase out*).

Kompetensi dan Persyaratan

Pendidikan:

1. Minimum lulusan S1 dalam bidang yang relevan.

Pengalaman Kerja:

1. Minimum 3 tahun pengalaman bekerja dalam lingkup program pemberdayaan masyarakat, terutama melatih, mendampingi serta memfasilitasi masyarakat di daerah pedesaan dan terpencil pada bidang pendidikan.

Fungsional:

1. Menunjukkan kemampuan dan kesuksesan untuk mengoordinasi dan memfasilitasi pelatihan dan pendampingan terkait pemberdayaan masyarakat, diskusi kelompok terarah, sosialisasi dan forum-forum diskusi di tingkat masyarakat.
2. Menunjukkan kemampuan dalam bekerjasama dan mengelola forum-forum *multi-stakeholders* di tingkat kecamatan maupun kabupaten.
3. Menunjukkan kemampuan yang baik dan berkelanjutan dalam berhubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, kemampuan bekerja dalam situasi dan kondisi yang sensitif serta kebijakan dan pengambil kebijakan yang menantang, termasuk dalam menanggapi tantangan secara cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan para klien.
4. Menunjukkan kemampuan dalam menulis dan berbicara Bahasa Indonesia dengan baik.
5. Menunjukkan kemampuan yang baik untuk menulis laporan-laporan berkualitas
6. Menunjukkan kemampuan bekerja dengan menggunakan program *Microsoft Office*

Manajerial:

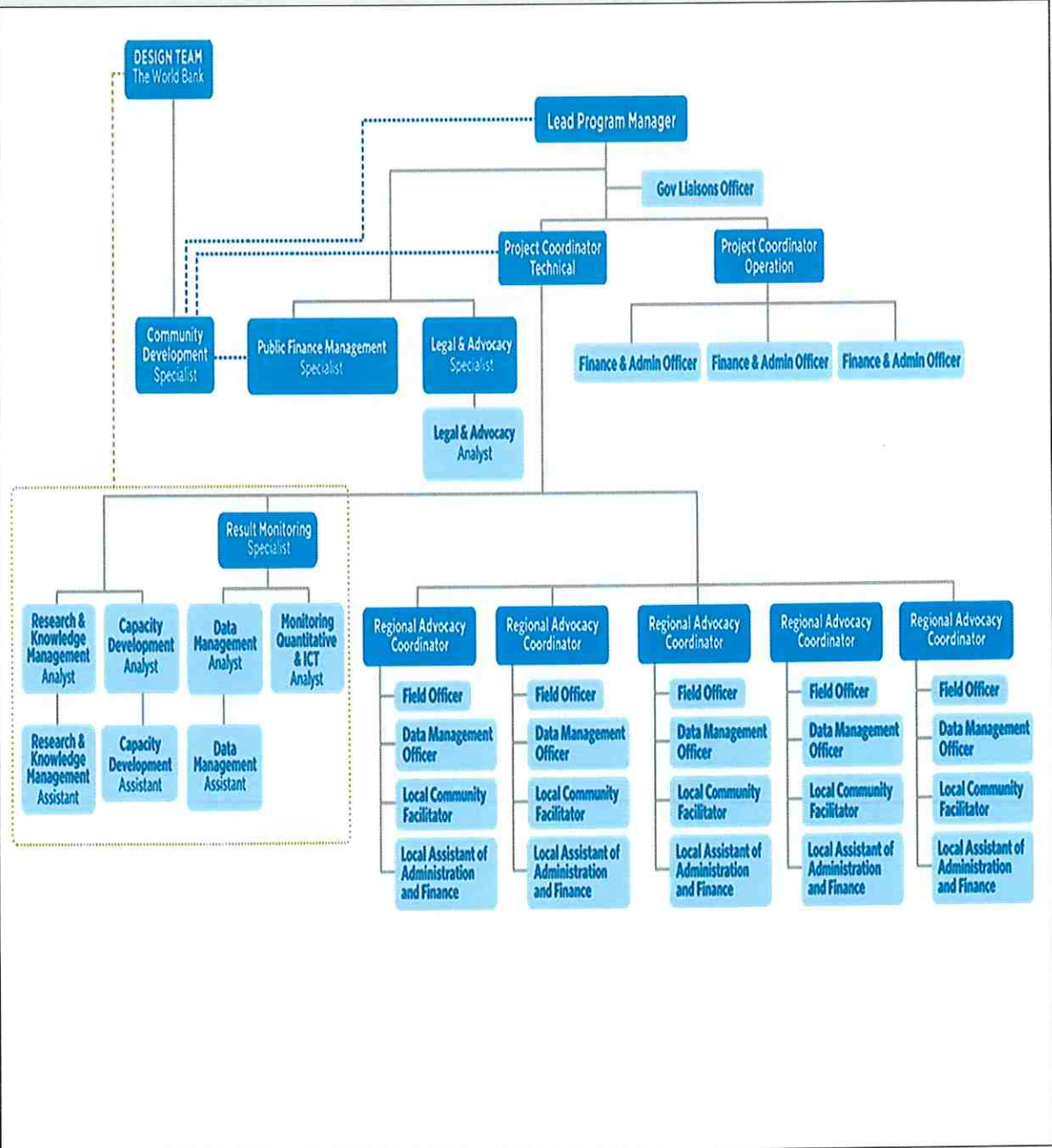
1. Menunjukkan kemampuan dan kesuksesan dalam melaksanakan program-program di lapangan, menyusun rencana dan jadwal kerja serta mensupervisi secara teknis dan operasional tim Fasilitator Masyarakat.
2. Menunjukkan kemampuan dalam memberi arah, mensupervisi dan memimpin tim fasilitator masyarakat untuk mencapai tujuan program pemberdayaan masyarakat di pedesaan/terpencil khususnya di luar Jawa.

Perilaku:

1. Menunjukkan kemampuan *interpersonal* yang tinggi, dapat berkomunikasi secara efektif dan saling menghargai dengan sesama rekan kerja, bawahan, atasan, pemangku kepentingan dan pihak manajemen KIAT Guru.
2. Menunjukkan kemauan untuk proaktif, memiliki motivasi tinggi dan seorang perintis.
3. Menunjukkan kemampuan dan kinerja yang baik saat bekerja di dalam tim maupun sendirian dengan supervisi yang minimal.
4. Menunjukkan kemampuan dalam mengelola waktu secara efektif, bekerja secara *multi-tasking*, mengejar target kerja yang ketat dan mengelola perubahan yang sering terjadi dalam program.

5. Menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, kejujuran dan integritas dan demokrasi

Pelaporan dan Struktur Koordinasi



8